BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Cimahi mulai dikenal pada tahun 1811, Gubernur Jendral Willem Daendels membuat jalan Anter - Panarukan, dengan dibuatnya pos penjagaan (IoJi) di Alun-alun Cimahi sekarang. Tahun 1874 - 1893, dilaksanakan pembuatan jalan kereta api Bandung - Cianjur sekaligus pembuatan stasiun kereta api Cimahi. Tahun 1886 dimulainya pembangunan pusat pendidikan militer dan fasilitas lainnya (RS Dustira, rumah tahanan militer, dll). Tahun 1935, Cimahi menjadi kecamatan (lampiran staad blad tahun 1935). Tahun 1962 dibentuk setingkat kewedanaan, meliputi 4 kecamatan: Cimahi, Padalarang, Batujajar dan Cipatat. Tahun 1975, ditingkatkan menjadi kota administratip (pp. no. 29 tahun 1975), diresmikannya pada tanggal 29 Januari 1976, merupakan Kotip pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia. Tahun 2001 ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom.

Cimahi yang berasal dari status Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung sesuai dengan perkembangan dan kemajuannya maka berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif, Cimahi dapat ditingkatkan statusnya dari Kecamatan menjadi Kota Administratif yang berada di wilayah Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh Walikota Administratif yang bertanggungjawab

kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung. Kota Administratif Cimahi dengan luas wilayah keselurahan mencapai 4.025,73 Ha, yang merupakan bagian dari Kabupaten Bandung Utara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.

3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi merupakan salah satu perangkat daerah pemerintah Kota Cimahi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Wali Kota dalan urusan keuangan daerah di bidang peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mencapai kemandirian daerah. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya mempunyai visi:

“TERDEPAN DALAM PENGKOORDINASIAN DAN PENGELOLAAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MENUJU CIMAHI MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA”.

Visi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022, diharapkan menjadi penggerak roda pembangunan dalam penggalian potensi sumber – sumber pendapatan yang mendukung Kota Cimahi menjadi kota yang kreatif yang maju dalam meningkatkan semua aspek kehidupan, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, serta melaksanakan pembangunan yang memiliki nilai – nilai agama, serta melaksanakan pembangunan yang memiliki kepribadian dan kebudayaan dalam mendukung REVOLUSI MENTAL bangsa.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka ditetapkan 4 (empat) Misi yang diemban dan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, yaitu:

Pertama, Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalitas SDM Aparatur Dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah.

Kedua, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Ketiga, Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendukung Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Keempat, Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pengelolaan Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Sedangkan Motto Badan Pengelola Pendapatan Daerah kota Cimahi:

"BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI"

Motto ini, sejalan dengan budaya kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah "CIK ATUH" yang mendasari terwujudnya pelayanan yang dilandasi rasa keikhlasan, kejujuran, keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai manifestasi dari nilai - nilai ibadah dengan tujuan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

3.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah mengacu pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi yang dapat dilihat pada gambar berikut;

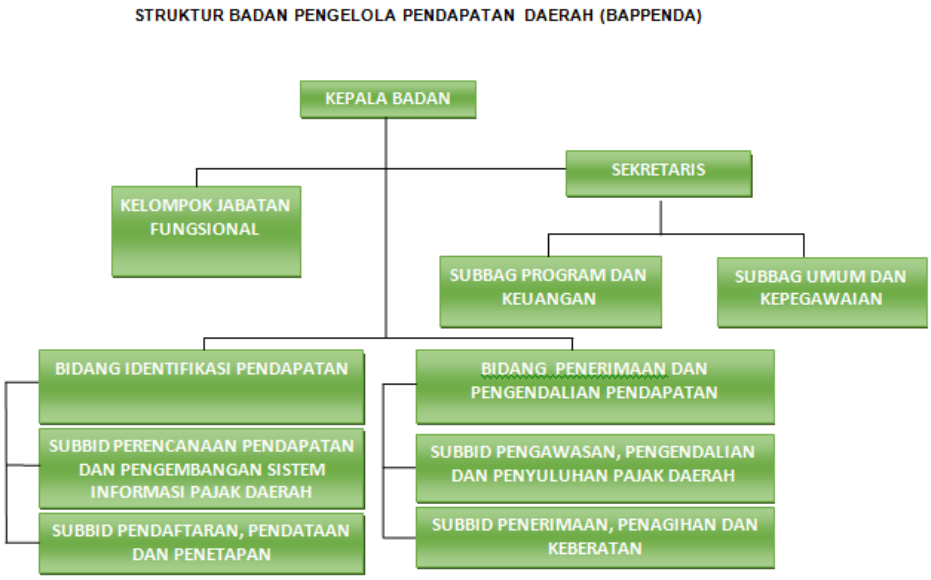

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Cimahi
(Sumber: www.cimahikota.go.id)

Deskripsi Tugas

Untuk menunjang program kerja tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi melaksanakan tupoksi sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu walikota dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan.

2. Sekertaris

Untuk menjalankan tugas pokok maka sekertaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
2. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan Kepegawaian Badan;

3. Penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
4. Pengelolaan keuangan Badan;
5. Pengelolaan situs web Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut sekertaris dinas dibantu oleh sub-sub bagian yang terdiri atas:

a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Untuk menjalankan tugas pokok maka sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, pembekalan, keperluan alat tulis kantor dan keprotokolan;
2. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
3. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum dan kepegawaian dinas;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekertaris, sesuai dengan tugasnya.

b. Sub Bagian Keuangan

Untuk menjalankan tugas pokok maka sub bagian keuangan mempunyai fungsi:

1. Perencanaan kegiatan administrasi keuangan;
2. Pelaksanaan pembagian tugas administrasi dan mengontrol keuangan;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekertaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Program dan Pelaporan

Untuk menjalankan tugas pokok maka sub bagian program dan pelaporan mempunyai fungsi:

1. Perencanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, mengevaluasi dan masing-masing bidang;
3. Pelaksanaan pembagian tugas dan konsultasi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, mengevaluasi dan laporan dari masing-masing bidang;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Identifikasi Pendapatan

Untuk menjalankan tugas pokok maka bidang identifikasi pendapatan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Rencana Kerja Bidang Identifikasi Pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
2. Pengamatan potensi pendapatan/perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutahiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi;
3. Perhitungan potensi masing-masing sumber pendapatan serta penetapan target/rencana pendapatan;

4. Pengoordinasian rencana penerimaan pendapatan dengan instansi terkait baik ditingkat Kota Cimahi, Provinsi jawa Barat serta Pemerintah Pusat;
5. Pelaksanaan Fungsi Penilaian semua jenis pajak daerah.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut bidang identifikasi pendapatan dibantu oleh beberapa seksi yang terdiri atas:

a. Seksi Perencanaan Pendapatan

Untuk menjalankan tugas pokok maka seksi perencanaan pendapatan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Identifikasi pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
2. Pengelolaan urusan pemerintah dan pelayanan umum meliputi perencanaan pendapatan daerah;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi pendataan Pendapatan

Untuk menjalankan tugas pokok maka seksi perencanaan pendapatan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Identifikasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum meliputi pendapatan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;

3. Penilaian pajak dan perhitungan besaran pajak, baik yang bersifat *Official assesment* maupun *Self assesment*;
4. Pelaksanaan pendaftaran objek pajak dan wajib pajak daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penerimaan Pendapatan

Untuk menjalankan tugas pokok maka bidang penerimaan pendapatan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang penerimaan pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
2. Pengelolaan administrasi pembukaan seluruh penerimaan pendapatan daerah;
3. Pelaksanaan penetapan besaran pajak daerah terhadap jenis pajak yang bersifat *Official assesment*;
4. Pelayanaan administrasi jenis pajak daerah yang bersifat *Self assesment*;
5. Pelaksanaan koordinasi dan konsiltasi dengan instansi terkait tentang penerimaan pendapatan daerah
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut bidang penerimaan pendapatan dibantu oleh beberapa seksi yang terdiri atas:

a. Seksi Penetapan dan Pelayanan Pendapatan

Untuk menjalakan tugas pokok maka seksi penetapan dan pelayanan pendapatan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis penetapan dan pelayana pendapatan daerah dan pajak daerah;
2. Pengelolaan urusan pemerintah dan pelayanan umum meliputi administrasi penetapan dan pelayanan pajak daerah;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Penerimaan Pendapatan

Untuk menjalankan tugas pokok maka seksi penerimaan pendapatan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan kegiatan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah;
2. Pelaksanaan administrasi penerimaan dan pembukuan seluruh pendapatan daerah;
3. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum meliputi penerimaan pendapatan daerah;
4. Pemantauan seluruh penerimaan pendapatan daerah baik dari setoran pajak daerah maupun transfer dana bagi hasil dari propinsi dan atau dari pemerintah pusat;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengendaliaan Pendapatan

Untuk menjalankan tugas pokok maka bidang pengendalian pendapatan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja bidang pengendalian pendapatan;
2. Pelaksanaan koordinasi rencana pengendalian seluruh pendapatan daerah;
3. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian pendapatan daerah;
4. Pengawasan atas ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak;
5. Pemeriksaan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
6. Pelaksanaan permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah;
7. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut bidang pengendalian pendapatan di bantu oleh beberapa seksi yang terdiri atas:

a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian pendapatan

Untuk menjalakan tugas pokok maka seksi pengawasan dan pengendalian pendapatan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan kegiatan pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;
2. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;
3. Pembinaan dan penyuluhan pendapatan daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. Seksi Penagihan dan Keberatan

Untuk menjalankan tugas pokok maka seksi penagihan dan keberatan pendapatan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kegiatan penagihan dan keberatan pajak daerah;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum meliputi penagihan dan keberatan pajak daerah;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Metode Penelitian

Dalam melakukan kegiatan Kerja Praktek, Kami melakukan beberapa metode dalam pengumpulan data untuk terselesaikannya Laporan Kerja Praktek ini, diantaranya adalah:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian diskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Disini variabelnya masih sama dengan variabel mandiri tetapi untuk sample yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan diskriptif dan komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Pada penyusunan laporan kerja praktek ini, kami menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif ini dilakukan dengan melihat langsung aktifitas yang ada di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi. Dan dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, yang membantu penelitian dalam pengumpulan dan menganalisis data. Dan pedoman atau prosedur serta teknik dalam perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan untuk membangun strategi yang menghasilkan model atau blue print penelitian.

3.2.2 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Salah satu komponen penting dalam penelitian adalah proses peneliti dalam pengumpulan data, selain itu hasil dan kesimpulan yang akan didapat pun akan menjadi rancu apabila pengumpulan data dilakukan tidak dengan benar.

3.2.2.1 Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti langsung dari narasumber yang bisa melalui kuesioner, kelompok fokus, observasi maupun wawancara, disini metode yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Wawancara

Kita mengambil data yang ada dengan mewawancarai objek penelitian yang ada seperti melalui seperti petugas identifikasi, petugas pelayanan dan petugas pengendalian.

2. Observasi

Dalam metode ini kita melakukan observasi kepada pihak terkait yaitu wajib pajak yang sedang berinteraksi kepada petugas pelayanan terkait pendaftaran berkas PBB dan interaksi antara petugas identifikasi terhadap wajib pajak yang bermasalah.

3.2.2.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, bisa melalui penulis sebelumnya ataupun dokumen, catatan, dan histori perusahaan yang tersusun dalam arsip, metode ini digunakan untuk pengumpulan data yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi juga struktur organisasi di BAPPENDA.

3.2.3 Metode Pendekatan dan Pengembangan Sistem

Metode pendekatan dan pengembangan sistem yang kami buat menerapkan Join Application Design (JAD), bersama atasan kita menganalisis dan berdiskusi

mengenai kekurangan dari sistem yang ada dan ditambahkan sistem yang menurut kita bermanfaat agar pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien.

3.2.3.1 Metode Pendekatan Sistem

Metode pendekatan sistem yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan sistem terstruktur. Pendekatan terstruktur dilengkapi tools dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil dari perancangan sistem yang dikembangakan mendapatkan struktur yang terdefinisi dengan baik dan jelas. Pendekatan sistem ini mempunyai dokumentasi yang baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Tools yang digunakan dalam metode terstruktur ini berupa diagram Flow Map Context, Diagram Flow Data.

3.2.3.2 Metode Pengembangan Sistem

Metodologi pengembangan sistem adalah kesatuan metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan yang dalam mengembangkan suatu sistem informasi. Untuk membangun suatu sistem yang kompleks secara sistematis dan terintegrasi, dibutuhkan metodemetode pembangunan sistem agar dapat menuntun pembuat untuk menghasilkan suatu sistem standar. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall atau biasa disebut sequential linier.

1. Analisa Kebutuhan

Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara atau studi literatur. Sistem analis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari user sehingga akan tercipta sebuah sistem komputer yang bisa melakukan tugas-tugas yang

diinginkan oleh user tersebut. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user requirment atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan sistem. Dokumen ini lah yang akan menjadi acuan sistem analis untuk menerjemahkan ke dalam bahasa pemrogram.

2. Desain Sistem

Tahapan dimana dilakukan penuangan pikiran dan perancangan sistem terhadap solusi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan perangkat pemodelan sistem seperti diagram alir data (data flow diagram), diagram hubungan entitas (entity relationship diagram) serta struktur dan bahasan data.

3. Penulisan Kode Program

Penulisan kode program atau coding merupakan penerjemahan design dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Dilakukan oleh programmer yang akan meterjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Tahapan ini lah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu sistem. Dalam artian penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat tadi. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut dan kemudian bisa diperbaiki.

4. Pengujian Program

Tahapan akhir dimana sistem yang baru diuji kemampuan dan keefektifannya sehingga didapatkan kekurangan dan kelemahan sistem yang kemudian dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan terhadap aplikasi menjadi lebih baik dan sempurna.

5. Penerapan Program dan Pemeliharaan

Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan (periperal atau sistem operasi baru) baru, atau karena pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional.